SUAP DALAM PERSPEKTIF BAHASA DAN BUDAYA SUNDA: KAJIAN TEORI METAFORA KONSEPTUAL DAN LINGUISTIK BUDAYA

Kholid Abdullah Harras[1], Sri Wiyanti[2], Undang Sudana[3]
[1]kholidharras@upi.edu, [2]sriwiyanti7903@upi.edu, [3]undangsudana@upi.edu
Universitas Pendidikan Indonesia

ABSTRAK

Dalam masyarakat dengan tingkat kesantunan tinggi seperti Sunda, terjadi paradoks di mana kehalusan budi bahasa sering kali menjadi inkubator bagi normalisasi kejahatan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi bagaimana istilah pameuli deudeuh atau cai herang bukan sekadar penghalus kata (eufemisme), melainkan sebuah operasionalisasi skema budaya yang mendistorsi nurani hukum. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan paradigma Linguistik Budaya dan Semantik Kognitif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi istilah eufemisme dalam kasus korupsi di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuapan di Jawa Barat mengalami kamuflase linguistik melalui mekanisme pemetaan (mapping) kognitif dari domain sumber konkret seperti afeksi (deudeuh) dan konsumsi sosial (kopi) ke domain target transaksi kriminal. Fenomena ini menciptakan disonansi moral massal di mana masyarakat kehilangan daya kritis untuk membedah etika kesantunan (Hade Tata) dengan praktik gratifikasi. Penelitian ini merumuskan bahwa korupsi beroperasi sebagai "penumpang gelap" (free rider) dalam nilai-nilai luhur seperti Silih Asih, sehingga memerlukan strategi dekonstruksi narasi baru berbasis kearifan lokal untuk memperkuat integritas birokrasi.
Kata kunci: *Metafora Konseptual, Linguistik Budaya, Suap, Eufemisme, Budaya Sunda.*

ABSTRACT

In societies with a high degree of politeness, such as the Sundanese, a paradox exists in which linguistic refinement often serves as an incubator for the normalization of corruption. This study aims to deconstruct how the terms pameuli deudeuh or cai herang are not merely euphemisms, but rather an operationalization of a cultural schema that distorts the legal conscience. The method used is descriptive qualitative research employing the paradigms of Cultural Linguistics and Cognitive Semantics. Primary data were collected through in-depth interviews and observations of euphemistic terms in corruption cases in West Java. The research findings indicate that bribery in West Java undergoes linguistic camouflage through a cognitive mapping mechanism from concrete source domainssuch as affection (deudeuh) and social consumption (coffee)to the target domain of criminal transactions. This phenomenon creates mass moral dissonance, where society loses its critical capacity to distinguish between the ethics of courtesy (Hade Tata) and the practice of gratification. This study posits that corruption operates as a free rider within noble values such as Silih Asih, thus requiring a new narrative deconstruction strategy grounded in local wisdom to strengthen bureaucratic integrity.
Keywords*: Conceptual Metaphor, Cultural Linguistics, Bribery, Euphemism, Sundanese Culture.*

1. PENDAHULUAN

Lanskap sosial masyarakat Sunda dikenal memiliki tingkat kesantunan yang tinggi melalui sistem Undak Usuk Basa yang rigid. Namun, secara paradoks, kehalusan budi bahasa ini sering kali disalahgunakan untuk melakukan redefinisi etis atas tindakan kriminal. Penyuapan tidak lagi dikonfrontasi sebagai "nyogok" yang kasar, melainkan dibalut metafora "ramah telinga" seperti artos kopi, pameuli deudeuh, hingga panglancar. Fenomena ini menciptakan kamuflase linguistik yang berbahaya; bahasa tidak lagi berfungsi sebagai jembatan kejujuran, melainkan sebagai perisai kognitif untuk mencuci dosa moral pelaku.

Urgensi penelitian ini berakar pada kenyataan pahit bahwa Jawa Barat telah bertransformasi menjadi episentrum kerawanan korupsi nasional. Data KPK menegaskan adanya pembusukan birokrasi yang sistemik, mulai dari skandal Meikarta hingga berbagai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat kepala daerah di Bandung, Bekasi, hingga Bogor. Dominasi kasus suap perizinan membuktikan bahwa transaksi ilegal terjadi di dalam ruang negosiasi yang dibalut oleh relasi personal dan tata krama lokal yang semu. Nilai-nilai luhur Sunda sering kali dijadikan instrumen pembenar untuk mengaburkan batasan antara penghormatan dan pengkhianatan terhadap publik.

Kajian korupsi sebelumnya, seperti Siahaan (2019), telah menyoroti bagaimana eufemisme di media massa berperan dalam mereduksi kemarahan publik. Namun, kajian tersebut belum menyentuh akar kognitif penutur dalam konteks budaya yang spesifik. Al-Mahrus (2022) juga mengeksplorasi gratifikasi sebagai bahasa negosiasi secara makro, namun belum mampu menangkap keunikan dialektika lokal yang terjadi di Jawa Barat. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan

mengintegrasikan Teori Metafora Konseptual dari Lakoff & Johnson (2003) dan Linguistik Budaya dari Sharifian (2017).

Kebaruan penelitian ini terletak pada kemampuannya membongkar bagaimana otak penutur Sunda melakukan pemetaan (*mapping*) nilai kasih sayang ke dalam transaksi kriminal melalui operasionalisasi skema budaya yang mendistorsi nurani hukum.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk:

1. **Mengidentifikasi leksikon dan ranah sumber eufemisme suap** dalam khazanah bahasa Sunda yang digunakan untuk mereduksi esensi kriminal penyuapan.
2. **Menganalisis mekanisme pemetaan kognitif** yang dilakukan penutur bahasa Sunda dalam mengubah konsep pelanggaran hukum menjadi konsep kebutuhan sosial.
3. **Mengungkap distorsi skema budaya Sunda**, khususnya nilai *Silih Asih* dan *Hade Tata*, yang bertransformasi menjadi infrastruktur mental untuk melegitimasi praktik gratifikasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan paradigma Linguistik Budaya (*Cultural Linguistics*) dan Semantik Kognitif. Secara desain, penelitian menerapkan metode Etnografi Komunikasi yang berfokus pada analisis tindak tutur (*speech acts*) dalam konteks budaya Sunda.

2.1. Sumber Data dan Kriteria Informan

Data primer bersumber dari tuturan lisan dan tulisan yang mengandung metafora suap di wilayah Bandung, Bogor, dan Bekasi. Informan untuk metode wawancara mendalam dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: (1) penutur jati bahasa Sunda yang berdomisili di Jawa Barat minimal 20 tahun; (2) memiliki latar belakang sebagai budayawan, praktisi hukum (Jaksa/Pengacara), atau tokoh masyarakat yang memahami diskursus sosial-politik lokal; dan (3) bersedia memberikan informasi secara objektif terkait fenomena eufemisme suap.Data sekunder mencakup dokumen putusan pengadilan Tipikor dan berita media lokal.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap:

1. **Metode Simak (Observasi):** Mengamati penggunaan istilah eufemisme di media sosial dan berita daring terkait kasus korupsi di Jawa Barat.
2. **Metode Cakap (Wawancara):** Melakukan wawancara mendalam untuk menggali persepsi penutur terhadap leksikon suap.
3. **Studi Dokumentasi:** Menelusuri leksikon suap dalam Kamus Basa Sunda untuk melihat pergeseran makna atau latar belakang budaya.

2.3. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif yang terdiri dari:

- **Reduksi Data:** Menyeleksi dan mengategorikan satuan lingual berdasarkan domain sumber metafora (konsumsi, afeksi, mekanika).
- **Analisis Domain Metafora:** Menggunakan Teori Metafora Konseptual (Lakoff & Johnson) untuk membedah mekanisme pemetaan (*mapping*) dari domain sumber ke domain target (transaksi kriminal).
- **Analisis Komponen Makna:** Menghubungkan temuan lingual dengan skema budaya (*cultural schemas*) seperti *Silih Asih* dan *Hade Tata* untuk mengungkap distorsi nilai yang terjadi.

2.4. Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian, dilakukan upaya menjaga keabsahan data melalui:

1. **Triangulasi Sumber:** Membandingkan data hasil observasi media dengan hasil wawancara informan dari latar belakang profesi yang berbeda (hukum vs budaya).
2. **Triangulasi Teori:** Mengkaji temuan data menggunakan dua perspektif teori sekaligus, yakni Semantik Kognitif dan Linguistik Budaya, untuk memastikan konsistensi analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Identifikasi Leksikal dan Eufemisme Suap

Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa leksikon suap dalam bahasa Sunda tidak muncul secara acak, melainkan terstruktur dalam ranah semantis tertentu untuk mengaburkan sifat kriminalnya. Berikut adalah klasifikasi leksikon berdasarkan data tuturan yang ditemukan:

Domain Sumber	Leksikon (Eufemisme)	Contoh Tuturan / Konteks (Korpus)	Makna Pragmatis
Konsumsi	*Artos Kopi / Udud*	*"Ieu mah hatur lumayan baé, bilih badé* ***ngopi-ngopi*** *di jalan."* (Ini sekadar ala kadarnya, barangkali mau ngopi di jalan)	Uang pelicin dalam jumlah kecil untuk mempercepat birokrasi.
Afeksi	*Pameuli Deudeuh*	*"Sanes nanaon, ieu mah tanda* ***deudeuh*** *sim saya ka bapa."* (Bukan apa-apa, ini tanda sayang saya kepada bapak)	Suap yang dibungkus sebagai ungkapan kasih sayang agar penerima merasa tidak terbebani secara moral.
Mekanika	*Panglancar*	*"Supados teu aya hambatan, kedah aya* ***panglancar*** *kanggo di lebet."* (Supaya tidak ada hambatan, harus ada pelancar untuk orang dalam)	Penekanan pada fungsi pragmatis suap untuk meniadakan hambatan administratif.
Kesucian	*Cai Herang*	*"Peryogi* ***cai herang*** *supados urusanna menjadi 'clik putih clak herang'."* (Butuh air jernih supaya urusannya jadi suci/selesai tanpa noda)	Menggunakan metafora air jernih untuk mengonstruksi kesan bahwa uang tersebut "bersih" atau diberikan secara ikhlas.

3.2. Mekanisme Kognitif: Pemetaan Metafora Konseptual

Berdasarkan Teori Metafora Konseptual (Lakoff & Johnson, 2003), ditemukan bahwa penyuapan dipahami melalui skema **[TARGET DOMAIN] ADALAH [SOURCE DOMAIN].** Penutur memetakan konsep abstrak "kejahatan" ke dalam konsep konkret "interaksi sosial".

1. Metafora: SUAP ADALAH KASIH SAYANG *(Pameuli Deudeuh*)

- **Sumber Domain (Kasih Sayang):** Hubungan emosional, keikhlasan, kedekatan personal.
- **Domain Target (Suap):** Transaksi ilegal, kewajiban timbal balik, korupsi.
- **Analisis:** Dengan memetakan suap sebagai "kasih sayang", pelaku melakukan *moral disengagement*. Otak tidak lagi memproses tindakan tersebut sebagai pelanggaran pasal hukum, melainkan sebagai upaya menjaga harmoni hubungan pribadi.

2. Metafora: SUAP ADALAH CAIRAN PELUMAS *(Cai Herang / Panglancar*)

- **Domain Sumber (Kaihan):** Sifat air yang mengalir, membersihkan, dan melicinkan gesekan.
- **Domain Target (Birokrasi):** Prosedur yang kaku, hambatan administratif, "kemacetan" izin.
- **Analisis:** Hambatan birokrasi dipandang sebagai "gesekan kasar" atau "kekeringan", sehingga suap berfungsi secara kognitif sebagai "pelumas" yang menormalkan aliran sistem yang tersumbat.

3.3. Dinamika Evolusi Bahasa: Dari Organik ke Pragmatis

Penelitian menemukan adanya pergeseran signifikan dalam penggunaan diksi suap antara subjek tradisional dan kontemporer (berdasarkan analisis putusan pengadilan 2010 vs 2023):

1. **Metafora Organik (Tradisional):** Dominan pada subjek di wilayah pedesaan atau relasi personal lama. Menggunakan istilah seperti *cai herang* atau *nyangu* (memberi nasi).
    - *Kutipan Informan (Budayawan):* "Dulu suap itu malu-malu, dibungkus istilah alam, seolah-olah kita memberi makan tamu."

2. **Metafora Pragmatis-Teknokratis (Kontemporer):** Dominan dalam kasus korupsi birokrasi modern di wilayah urban (Bandung Raya, Bekasi). Istilah bergeser menjadi *dana koordinasi*, *komitmen*, atau *uang administrasi*.

    - *Bukti Empiris:* Dalam Putusan Pengadilan Tipikor terkait kasus perizinan di Jawa Barat (2022), istilah "uang kopi" telah digantikan secara sistemik oleh istilah "dana taktis" atau "persentase komitmen".

Pergeseran ini menunjukkan bahwa meskipun esensinya tetap suap, bahasanya telah beradaptasi menjadi lebih formal dan "pseudo-profesional" untuk menghindari kecurigaan hukum, namun tetap mempertahankan akar distorsi moral yang sama.

3.4. Linguistik Budaya: Skema Budaya yang Didistorsi

Dalam perspektif Linguistik Budaya (Sharifian, 2017), praktik korupsi di Jawa Barat beroperasi sebagai "penumpang gelap" (*free rider*) yang memanipulasi skema budaya kolektif masyarakat Sunda. Analisis menunjukkan bahwa nilai luhur *Silih Asih* (saling mengasihi) dan *Hade Tata* (etika kesantunan) telah mengalami distorsi kognitif yang sistemik. Skema budaya *Méré* (memberi), yang secara tradisional berakar pada kedermawanan sosial tanpa pamrih, mengalami "pembusukan semantik" menjadi legitimasi bagi gratifikasi.

Filosofi *Hade Tata* mengharuskan setiap individu bertata krama saat meminta bantuan kepada pihak lain. Namun, dalam konteks birokrasi, tata krama ini disalahpahami sebagai kewajiban memberikan "tanda terima kasih" atau *pameuli deudeuh*, baik sebelum maupun sesudah urusan selesai. Penggunaan terminologi budaya ini menciptakan perisai moral bagi pelaku, sehingga transaksi ilegal tidak lagi dipersepsikan sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai pemenuhan etika kesantunan. Akibatnya, terjadi disonansi moral massal di mana masyarakat kehilangan daya kritis untuk membedakan antara hadiah (*hadiah*) yang sah secara adat dengan suap yang dilarang undang-undang.

3.5. Dinamika Evolusi Bahasa Lintas Generasi

Penelitian ini menemukan adanya pergeseran pola penggunaan metafora suap yang dipengaruhi oleh perubahan lanskap sosial dan teknokrasi di Jawa Barat. Generasi penutur tradisional cenderung menggunakan metafora "organik-budaya" yang berakar pada kearifan lokal, seperti istilah *cai herang* atau *pameuli kopi*. Istilah-istilah ini mencerminkan relasi personal yang akrab namun manipulatif.

Sebaliknya, generasi pejabat kontemporer di wilayah teknokratis seperti Bandung Raya atau Bekasi, menunjukkan kecenderungan menggunakan metafora "pragmatis-administratif". Berdasarkan analisis dokumen hukum dan observasi lapangan, istilah tradisional mulai digantikan oleh terminologi seperti "dana koordinasi", "komitmen", "dana taktis", atau "uang administrasi". Evolusi ini membuktikan bahwa korupsi memiliki sifat adaptif; ia bertransformasi ke dalam bahasa kekuasaan yang lebih formal dan "pseudo-profesional" untuk menghindari deteksi hukum, namun tetap mempertahankan esensi manipulatif dan distorsi moral yang sama kuatnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penyuapan dalam masyarakat Sunda telah mengalami normalisasi yang masif melalui mekanisme kamuflase linguistik. Dengan memanfaatkan kehalusan bahasa (*undak usuk basa*) dan keluhuran budaya, tindakan kriminal suap tidak lagi dikonfrontasi sebagai pelanggaran hukum yang kasar, melainkan dibalut oleh metafora yang "ramah telinga". Melalui mekanisme metafora konseptual, terjadi pemetaan ulang (*remapping*) dalam kognisi penutur di mana domain target "kejahatan" diproses sebagai domain sumber "interaksi sosial" yang wajar.

Lebih jauh, penelitian ini mengungkap bahwa skema budaya *Silih Asih* (saling mengasihi) dan *Hade Tata* (etika kesopanan) telah didistorsi menjadi infrastruktur mental yang melegitimasi gratifikasi. Nilai-nilai luhur ini kini berfungsi sebagai "penumpang gelap" yang memberikan perlindungan moral bagi pelaku korupsi. Fenomena ini menciptakan disonansi moral massal, di mana batas antara kedermawanan adat dan pengkhianatan terhadap publik menjadi kabur akibat manipulasi bahasa.

4.2. Saran

Berdasarkan temuan tersebut, diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Strategi Dekonstruksi Narasi:** Dibutuhkan strategi komunikasi publik berbasis "bahasa ibu" untuk melawan eufemisme korupsi. Lembaga antikorupsi seperti KPK perlu merumuskan kampanye yang secara tegas memisahkan definisi "tradisi memberi" dengan "suap" menggunakan dialek dan konteks lokal agar lebih menyentuh kesadaran kognitif masyarakat.
2. **Reposisi Pendidikan Integritas:** Kurikulum pendidikan karakter di Jawa Barat harus mampu mengembalikan makna asli *Silih Asih* dan *Hade Tata*. Nilai-nilai ini harus dibersihkan dari distorsi pragmatis agar tidak lagi dijadikan tameng bagi praktik korupsi birokrasi.
3. **Rekomendasi Akademik:** Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif antara eufemisme suap dalam bahasa Sunda dengan bahasa daerah lain di Nusantara, seperti bahasa Jawa atau Bugis. Hal ini penting untuk membedah apakah pola disonansi moral berbasis budaya ini bersifat universal di Indonesia atau memiliki karakteristik unik yang spesifik secara kultural.

REFERENSI

Al-Mahrus, A. 2022. *Sosiolinguistik Korupsi: Bahasa dan Kekuasaan*. Jakarta: Pustaka Utama.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2024. Laporan Penetrasi Internet Indonesia. Jakarta: APJII.

Castells, M. 2010. Kebangkitan Masyarakat Jaringan. Oxford: Wiley-Blackwell.

Danadibrata, R.A. (2006). *Kamus Basa Sunda*. Bandung: Kiblat Buku Utama & Universitas Padjadjaran.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2023. *Status Literasi Digital di Indonesia 2022: Laporan Survei Nasional.* Jakarta: Kominfo.

Lakoff, G. & Johnson, M. 2003. *Metafora yang Kita Jalani.* London: Universitas Chicago Press.

Mulyadi, D. 2021. *Evolusi Upeti menjadi Uang Administrasi: Kajian Sosiolinguistik Birokrasi.* Bandung: Arfino Raya.

Sharifian, F. 2017. *Linguistik Budaya.* Amsterdam: Perusahaan Penerbitan John Benjamins.

Siahaan, A. 2019. Eufemisme Korupsi di Media Indonesia. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 14(2), 112-125.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	Institusi	Pendidikan	Minat Penelitian
Dr.Kholid Abdullah Harras, M.Pd	FPBS UPI	S3 Linguistik UPI	Semiotik
Dr.Sri Wiyanti, M.Hum	FPBS UPI	S3 Linguistik Unpad	Geolinguistik
Undang Sudana, M.Hum	FPBS UPI	S2 Linguistik Unpad	Dialektologi